	UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS HUKUM Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 7774145 – 748107. Faksimili (0541) 7774144 – 748107 Fax. (0541) 743820 Samarinda 75119 Laman: https://fh.unmul.ac.id	KODE
		Revisi: 2
		POB/KSP-07/FH-Unmul/VIII/2019
IDENTITAS DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN	TANGGAL PEMBUATAN 17 Juni 2019
		TANGGAL CETAK 20 Juli 2019
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	TANGGAL REVISI 22 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH	GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS HUKUM	TANGGAL IMPLEMENTASI 30 Agustus 2019

1. TUJUAN

- 1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di Fakultas Hukum

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

- 2.1. Tata cara penyusunan RKAK/L
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RKAK/L

3. DEFINISI/KATA KUNCI

- 3.1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan adalah mekanisme yang harus dilaksanakan Fakultas dalam membuat rencana kerja dan anggaran-kementerian dan lembaga (RKAK/L) di Fakultas Hukum.

4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

- 4.1. Dekan
- 4.2. Wakil Dekan
- 4.3. Koordinator Program Studi
- 4.4. Koordinator Tata Usaha
- 4.5. Ko sub UK

4.6. Bendahara

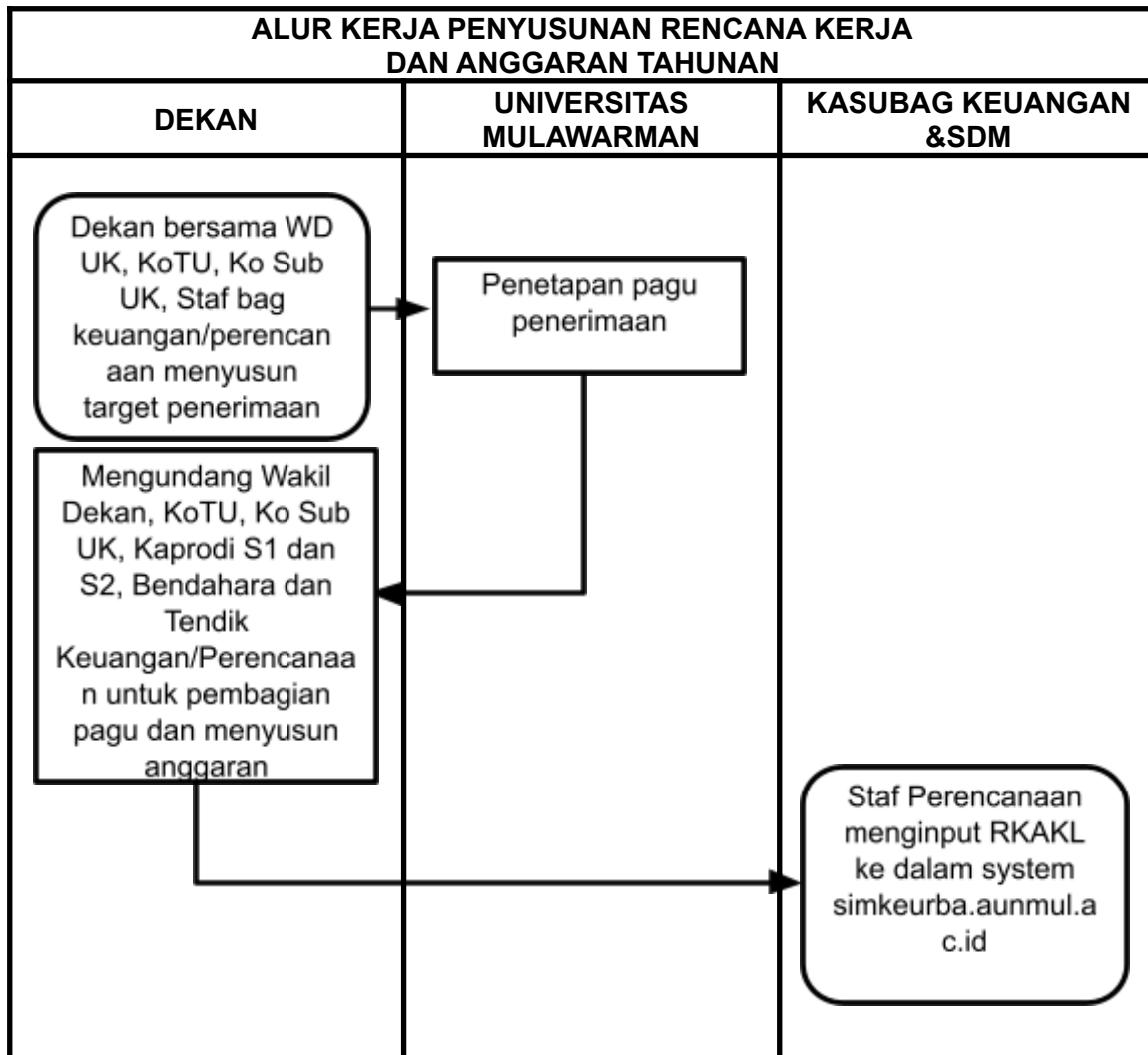
4.7. Tendik Perencanaan dan Keuangan

5. PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Dekan, KoTU, Ko Sub UK dan bagian keuangan/perencanaan menyusun target penerimaan	Dekan, KoTU, Ko Sub UK, Staf Bag.Perencanaan dan Keuangan	Berkas surat	1 hari	Surat
2	Penetapan pagu penerimaan	Universitas Mulawarman	Berkas surat	1 hari	Surat
3	Dekan mengundang Wakil Dekan, KoTU, KO Sub UK, Koprodi S1 dan S2, Bendahara dan Tendik Keuangan untuk dan menyusun anggaran berbasis program kerja	Dekan, KoTU, Ko Sub UK, Koprodi S1 dan S2 & Bendahara, TendikPerencanaan dan Keuangan	Draft RKAKL	1 hari	Draft RKAKL
4	Ko Sub UK dan staf bagian perencanaan menginput perencanaan pada simkeurba.unmul.ac.id	Ko Sub UK dan Bagian peencanaan	RKAKL	1 jam	RKAKL

6. ALUR KERJA

Alur kerja prosedur penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dapat dilihat sebagai berikut:



7. REFERENSI

- 7.1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 7.2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
- 7.3. UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- 7.4. Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.